

SKRIPSI

***ADAPTIVE GOVERNANCE* PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DINAS KELAUTAN KABUPATEN
LUWU TIMUR**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

***ADAPTIVE GOVERNANCE* PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DINAS KELAUTAN KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan (S. IP)



Disusun dan diajukan oleh

Revalina

Nomor stambuk: 105641100619

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

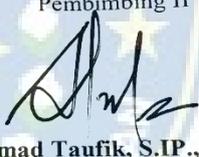
Judul Skripsi : *Adaptive Governance* Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur.
Nama Mahasiswa : Revalina
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100619
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

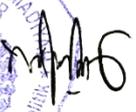

Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si


Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui:

Dekan Fisip
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

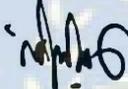
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 0214/FSP/A.4-II/XII/45/2024 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata I (S1) dalam program Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari sabtu 11 Januari 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 1207163

TIM PENGUJI

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

 ()

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

 ()

3. Hamrun, S.IP. M.Si

 ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Revalina

Nomor Induk Mahasiswa : 105641100619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Revalina

ABSTRAK

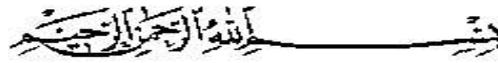
Revalina 2023. *Adaptive Governance* Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur (Dibimbing Oleh Nuryanti dan Ahmad taufik).

Adaptive Governance Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Langkah-langkah adaptive Governance dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberi gambaran tentang adaptive governance. Dan sumber data penelitian berupa data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 4(empat) orang. Ada pun Fokus penelitian ini dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Timur memiliki Tiga Indikator yaitu pertama Pengembangan Sumber daya manusia adaptive kedua penguatan organisasi adaptive dan yang ketiga pembaharuan institusional pemerintah adaptive

Hasil penelitian menghasilkan dalam pengembangan sumber daya manusia adaptive konteks pengembangan budidaya rumput laut melibatkan peningkatan pengetahuan,keterampilan, dan kemampuan individu yang terlibat dalam industry rumput laut untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam praktik budidaya kemudian dalam penguatan oraganisasi adaptive kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan organisasi agar lebih efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, memiliki kemampuan mengidentifikasi,merespons, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya pembaharuan institusional pemerintah adaptive adalah pendekatan untuk mengembangkan system pemerintah yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat dalam aspek lingkungan, teknologi ,pasar dapat membantu dalam merancang regulasi yang relevan dan adaptive.

Kata Kunci: Pengembangan Sumber Manusia adaptif, pengembangan organisasi adaptif, pembaharuan institusional pemerintah adaptif.


KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Adaptive Governance Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur”**. skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di universitas muhammadiyah makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada bapak Ilham dengan ibu Nurhaeni selaku kedua orang tua saya terimakasih bapak, ibu telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral, maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
2. Kepada Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP terimakasih telah membimbing.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mengelolah fakultas dengan sebaik-baiknya.

4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Buat saudara-saudariku tercinta, dan teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, serta bantuan yang tiada ternilai baik moral, maupun materil kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 05 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Revalina

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian, Konsep dan Teori	10
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	14
C. Fungsi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	23
D. Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut	27
E. Kerangka Pikir	28
F. Fokus Penelitian	29
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian	30
B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Objek penelitian	37

B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Pikir	28
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	32
Tabel 4.2 Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	39
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.	40
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023. ...	41
Tabel 4.5 Nama Dan Jabatan Di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.	42
Tabel 4.6 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.....	43
Tabel 4.7 Jenis Dan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021.	46

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2023 38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan sektor publik dengan privat dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebuah negara dapat dikatakan maju dan berkembang dapat dilihat dari pemerintahannya. pemerintah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya gerakan perubahan yang disusun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. salah satu strategi baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini yaitu *collaborative governance*. perkembangan lingkungan yang semakin mengglobal saat ini menuntut adanya *Collaborative* pemerintah dalam mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi. maka dari itu, *collaborative governance* atau kolaboratif pemerintahan hadir sebagai suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penanganan masalah publik. kerja sama yang dimaksud yaitu antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. (Irawan, 2017).

Konsep *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tatanan pemerintahan yang melibatkan beberapa *stakeholders* atau pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang

dirumuskan dalam sebuah forum. adapun fokus dari *collaborative governance* yaitu pada kebijakan dan masalah public (Irawan, Denny. 2017).

Sejalan dengan hal yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani, sejalan pula dengan payung hukum yang ada dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani serta didukung oleh peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. hal ini bertujuan untuk bisa mengayomi petani sehingga lebih profesional dan penghasilannya bisa lebih meningkat dari sebelumnya. petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan agar dapat berdaya, mandiri dan berdaulat serta meningkatkan ketahanan pangan.

Tujuan sebuah Negara terbentuk yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal 1 bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan bersifat berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, terkait dengan hal ini pemerintah daerah serta masyarakat melalui pelayanan sosial dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat dengan meliputi

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta segala hal yang terkait dengan keamanan masyarakat.

Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai regulator, adapun hal-hal yang dilaksanakan pemerintah sebagai *regulator* seperti pembuatan peraturan terkait pengelolaan dan pemberdayaan petani rumput laut, dan menyiapkan instrumen atau alat-alat prasarana oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. kenyataan yang terjadi yaitu belum ada peraturan khusus tentang hal-hal yang mengatur pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu.

Pemerintah sebagai dinamisator seperti melakukan pengarahannya dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani rumput laut, memberikan bimbingan, dan juga sebagai penggerak untuk meningkatkan pemberdayaan petani rumput laut. pemberian bimbingan dan pengarahannya terkait pengelolaan rumput laut masih belum efektif terbukti dengan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan rumput laut di Kabupaten Luwu.

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan suatu kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan dan menjembatani segala kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. secara khusus disini pemerintah melakukan pelatihan, peningkatan keterampilan untuk petani rumput laut, dan memberikan bantuan dana atau pendanaan. namun masalah yang kemudian muncul yaitu masih kurangnya dukungan dari pemerintahan Desa untuk memberdayakan masyarakat. di Kecamatan Burau

belum terdapat KUD (Koperasi Unit Desa). KUD merupakan bantuan untuk masyarakat berupa pemberian modal, sehingga dengan adanya KUD masyarakat khususnya petani rumput laut bisa mengembangkan pengelolaan rumput laut.

Kecamatan Burau memiliki potensi untuk pengelolaan rumput laut, oleh karena itu pemerintah diharapkan bertindak sebagai regulator, dinamisator, serta fasilitator dalam pengelolaan rumput laut yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur khususnya untuk meningkatkan perekonomian petani rumput laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 mengenai perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur Pasal 5 ayat 5 menetapkan kawasan budidaya memiliki nilai yang strategis Kabupaten dalam manfaat sumber daya alam di ruang darat, laut, dan juga udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi secara sinergis untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang wilayah. kemudian diperjelas lagi pada pasal 26 ayat 2 bahwa kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdapat di Kecamatan Mangkutana, kecamatan Nuha, Kacamtan Angkona, KecamatanWotu Kecamatan Burau, Kecamatan Kalena, Kecamatan Malili, Kecamatan Wosponda, kecamatan Towuti. Oleh karena itu karena rumput laut merupakan tanaman pangan maka dari itu petani rumput laut yang berada di Kecamatan Burau harus mengelola tanaman pangan tersebut menjadi lebih baik.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) semestinya melakukan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat. sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 yang berisi tentang organisasi dan tata

kerja inspektorat, badan rencana pembangunan daerah serta lembaga teknis dan lembaga lainnya di Kabupaten Luwu Timur, pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, atau pemerintahan Desa dan Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan koperasi untuk usaha apapun itu dengan jumlah anggota masyarakat Desa yang berlokasi di sekitar daerah pedesaan, dan kerja seringkali mencakup satu wilayah Kecamatan. bentuk koperasi unit pedesaan ini tidak lain adalah untuk penyatuan dalam berupa koperasi petani yang kecil dan jumlahnya banyak di pedesaan. oleh karena di Kecamatan belum terdapat KUD maka inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa agar dapat membantu masyarakat dalam bidang perekonomian. pentingnya pembentukan KUD juga diperjelas dalam Pasal 10 untuk penyelenggaraan tugas-tugas seperti yang dimaksud pada pasal 9, di dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa atau Kelurahan menyelenggarakan fungsi bagian yaitu membina dan melaksanakan tugas untuk pemberdayaan masyarakat serta bagian pengelolaan unit pelaksana teknis badan, dimana unit yang dimaksud disini yaitu koperasi unit desa.

Upaya untuk memperdaya masyarakat terdiri atas tiga sisi yaitu satu, menciptakan suasana dan iklim yang bisa membuat masyarakat menjadi berkembang (*enabling*). tolak ukurnya yaitu pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki kemampuan yang bisa berkembang. hal

tersebut berarti tidak ada masyarakat atau petani rumput laut yang tanpa kemampuan untuk diberdayakan, karena jika seperti itu maka manusia atau masyarakat akan punah. pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membangun kemampuan daya masyarakat, dengan memotivasi serta meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan juga berupaya agar kemampuan masyarakat dikembangkan. masyarakat di Kecamatan Burau tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, khususnya petani rumput laut karena sudah berada dalam wilayah yang kompetensi rumput laut yang mendukung maka masyarakat setempat tentunya dapat mengelola rumput laut dengan dukungan dari pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah menegaskan bahwa konstruksi negara kepulauan dengan wilayah laut terluas di dunia beserta hasil sumber daya alam yang dikandungnya merupakan modal utama dalam pembangunan nasional yang sangat strategis. pengelolaan atas potensi sumber daya kelautan merupakan aset untuk kedepannya bagi suatu bangsa yang memerlukan dukungan politik dan pemihakan nyata dari seluruh stakeholders. oleh karena itu sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.

Kedua meningkatkan kemampuan yang masing-masing dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). untuk hal tersebut dibutuhkan beberapa langkah positif, selain untuk menciptakan iklim dan suasana. peningkatan ini memerlukan beberapa langkah yang pasti atau nyata, dan juga menyangkut

penyediaan berbagai masukan (*input*), serta menentukan akses untuk berbagai peluang yang ada (*opportunities*) kemudian akan menjadikan masyarakat diberdayakan. dalam memberdayakan masyarakat upaya yang paling penting dilakukan yaitu peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses seperti modal, teknologi, informasi, lapangan pekerjaan, dan pasar. pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana seperti fisik, irigasi, perbaikan jalan, listrik, dan sarana sosial yang menyangkut sekolah beserta fasilitas pelayanan untuk kesehatan, yang bisa dijangkau kalangan masyarakat pada lapisan paling bawah, dan juga termasuk penyediaan program dari pemerintah berupa pemberian dana, pemberian latihan, dan pemasaran di daerah pedesaan, dimana pemberdayaan ini difokuskan pada mereka yang kemampuannya masih kurang.

Tiga pemberdayaan bermakna melindungi. dalam tahap memberdayakan masyarakat, masyarakat yang kemampuan masih kurang harus diberdayakan dengan lebih baik agar dapat bersaing. oleh sebab itu perlindungan kepada mereka yang lemah lebih diutamakan dalam pemberdayaan masyarakat. perlindungan tidak berarti menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan menjadikan yang berkemampuan lemah akan menjadi semakin lemah. fungsi pemberdayaan tersebut hal penting yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dengan sistem perekonomian yang baik. untuk meningkatkan aspek ekonomi masyarakat dengan menggali potensi yang ada di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau diperlukan kerja sama antara KUD (Koperasi Unit Desa) dengan masyarakat dibawah

naungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau. namun pada kenyataannya di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau belum adanya koperasi unit desa (KUD) dan perusahaan lokal membuat para petani bergantung pada pengumpul dalam menjual hasil rumput lautnya, sehingga petani belum bisa mengolah rumput laut dengan maksimal.

Adaptive Governance berfungsi untuk meningkatkan peran street level birokrasi, regulasi dan manajemen lainnya. Dengan di jalankannya adaptive governance dapat merangkul seluruh pola pemerintah untuk mendefinisikan kembali dan memfasilitasi tujuan pemerintah dan kebijakan sumber daya alam dan organisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul suatu permasalahan. maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Adaptive Governance pemerintah dinas kelautan Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau dalam pengembangan budidaya Rumput Laut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah *Adaptive Governance* dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah *Adaptive Governance* dalam pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi, mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul penelitian	Tujuan Penelitian
1	Jacob	2019	Collaborative innovation in the public sector: the argument	1. Untuk mengetahui kolaborasi multi-aktor dapat memacu inovasi publik. 2. Untuk mengetahui inovasi kolaboratif melalui kombinasi desain kelembagaan dan pelaksanaan kepemimpinan dan manajemen.
			Persamaan	Perbedaan
			Penelitian yang dilakukan Jacob, dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan teori <i>Collaborative</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh Jacob, adalah Collaborative innovation in the public sector: the argument, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah <i>adaptive governance</i> pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur.
2	Rahayu,	2018	Penerapan	Untuk mendeskripsikan

	Sinta Puspita		Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	bagaimanakah proses Collaborative Governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
	Persamaan			Perbedaan
	<p>Penelitian yang dilakukan Rahayu Sinta Puspita, dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan teori <i>Collaborative</i>.</p>			<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Sinta Puspita, adalah Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah <i>adaptive governance</i> pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur.</p>
3	Hesti Kusuma Yuwi Citra, Yusuf Adam Hilman	2017	Governance Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan dalam pelaksanaan program pertanian 2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pertanian 3. Untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan serta manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program pemberdayaan
	Persamaan			Perbedaan

<p>Penelitian yang dilakukan Hesti Kusuma Yuwi Citra, Yusuf Adam Hilman, dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan teori <i>Collaborative</i>.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Sinta Puspa, adalah Governanace Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah <i>adaptive governance</i> pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur.</p>
---	--

2. Manajemen Publik

Manajemen merupakan cabang dari ilmu sosial, ilmu manajemen menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, memiliki kaidah- kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat diterapkan pada semua situasi manajerial pada semua tipe organisasi, baik organisasi privat dan bisnis maupun organisasi publik. istilah manajemen memiliki arti yang variatif. manajemen yaitu adanya tanggungjawab terhadap sebuah organisasi serta proses menjalankan organisasi itu sendiri terkait dengan sumberdaya (manusia dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana manajemen yang terdiri dari *Men, money, material, machine, methode*, market atau yang lebih dikenal dengan istilah 6M.

- a. *Men* (Manusia) yaitu dalam manajemen dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana dan produksi.
- b. *Money* (Dana) yaitu dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan dana atau keuangan. sebuah organisasi atau lembaga publik tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya dana atau keuangan. faktor keuangan salah satu nyawa dalam suatu organisasi.
- c. *Materials* (Barang Mentah) yaitu pengolahan barang mentah menjadi suatu barang yang bernilai sehingga mampu memberikan keuntungan bagi organisasi.
- d. *Machine* (Mesin) yaitu mesin pengolah dan teknologi yang dipakai untuk mengolah barang mentah. dengan adanya mesin pengolah ini memudahkan dan mengefisienkan dalam proses produksi.
- e. *Method* (Cara/Metode) yaitu cara yang efektif yang digunakan dalam kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- f. *Market* (Tempat) yaitu lokasi pemasaran dari hasil produksi. produk yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi organisasi.

Manajemen instansi pemerintah yaitu studi interdisipliner dari berbagai aspek universal organisasi, dan juga bagian dari fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* pada satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. manajemen publik dalam 3 bagian yaitu seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). secara umum apa yang dimaksud manajemen publik sebagai seni yaitu

aktivitas dalam bentuk yang kreatif dilaksanakan oleh para praktisi yang tidak terhitung. artinya, manajemen publik aktivitas yang tingkat fleksibilitasnya tinggi dan ketika dijalankan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. salah satu pakar manajemen yaitu Henry Fayol mengemukakan administrasi merupakan bagian dari manajemen, karena administrasi adalah salah satu fungsi manajemen.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara konseptual mengandung makna pemberian kekuasaan (*empowerment*), yang berasal dari kata *power* yaitu keberdayaan. oleh karena itu ide utama memberdayakan adalah berkaitan dengan kekuasaan. kekuasaan sangat erat kaitannya dengan skill seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Ilmu sosial tradisional menekankan jika kekuasaan itu sama halnya dengan memberikan pengaruh serta control. pemahaman ini dimaksudkan bahwa kewenangan atau kekuasaan itu tidak bisa diubah (Suharto, 2014).

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti pengetahuan dan skill. bertolak atas definisi sebelumnya maka memberdayakan masyarakat mengandung makna sebagai tahap tahap menuju masyarakat yang berdaya, atau tahap dalam mendapatkan daya. Kekuatan, skill dan pengetahuan yang lebih dari orang yang memiliki

kemampuan daya terhadap mereka yang masih kurang pengetahuannya untuk diberdayakan. definisi proses menunjukkan adanya langkah yang dilaksanakan secara sistematis dan menunjukkan tahap usaha merubah masyarakat yang pengetahuannya kurang menjadi masyarakat yang berpengetahuan luas untuk diberdayakan. proses tersebut merujuk pada tindakan yang nyata dan dilaksanakan melalui tahap demi tahap agar merubah suatu kondisi masyarakat yang dianggap lemah dan pengetahuan yang kurang, serta menjadikan masyarakat memiliki keterampilan yang baik.

Bertolak pada pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan dari pada pemberian daya. lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu aksi dan pergulatan kekuasaan, sedangkan untuk konteks indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan adalah upaya memberikan daya dan meningkatkan daya (Nilasari, 2017).

Winarni kemudian memaknai bahwa pemberdayaan masyarakat itu meliputi tiga hal penting yaitu pengembangan, memperkuat potensi daya, terciptanya kemandirian. pada dasarnya pemberdayaan adalah penciptaan iklim 18 dan suasana yang memiliki potensi untuk mengembangkan masyarakat. logika ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya.

Setiap masyarakat tentunya mempunyai kemampuan masing-masing, namun terkadang seseorang tidak dapat mengetahui bagaimana

kemampuan sesungguhnya yang dimiliki. oleh sebab itu daya harus bisa digali dan dikembangkan. jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan dikatakan sebagai upaya dalam meningkatkan daya, dengan cara memberikan motivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang telah dimiliki serta berusaha meningkatkan potensi tersebut (Nilasari, 2017). makna yang diperoleh dari penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- b. Pemberdayaan adalah proses dan tahap yang mutlak untuk dilaksanakan agar meningkatkan daya hingga masyarakat mampu mandiri. pemberdayaan mempunyai makna untuk membangkitkan kapasitas.

Konsep utama dalam pemberdayaan yaitu bagaimana memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menentukan arahnya sendiri dalam kehidupan. pemberdayaan adalah pemberian tekanan pada otonom untuk mengambil keputusan dari suatu kelompok masyarakat. penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus yang lokalitas menjadikan landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. dalam hal ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat.

Pendekatan untuk pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek namun juga sebagai subyek. konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi dimana masyarakat diikutsertakan dalam proses pembangunan, dan hak guna menikmati hasil dari pembangunan. pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek tentang kemampuan seseorang. benang merahnya yaitu proses ini melihat pentingnya untuk mengalihfungsikan individu yang awalnya hanya objek menjadi subjek.

pemberdayaan mengandung dua pengertian utama, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti yang sempit namun juga mengandung arti penguasaan klien atas:

- a. Pilihan personel serta kesempatan hidup: potensi dalam membuat keputusan tentang gaya hidup, tempat tinggal, serta pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan kemampuan dalam memilih keperluan hidup yang sesuai dengan keinginannya.
- c. Ide dan gagasan skill dalam mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan di dalam forum tanpa tekanan.
- d. Lembaga kemampuan untuk menjangkau, menggunakan serta mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Pemberdayaan merupakan proses serta tujuan. sebagai proses, pemberdayaan ini adalah kegiatan dalam meningkatkan kekuasaan atau kemampuan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan seperti pengetahuan yang luas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi, dan juga sosial seperti kepercayaan diri.

2. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam memberdayakan masyarakat pelaksana harus mencapai target dimana ketika masyarakat sudah mampu mandiri. dari persepsi tersebut berarti pemberdayaan melalui tahap pembelajaran hingga bisa mandiri, namun meskipun begitu untuk mencapai kemandirian tetap harus dibarengi dengan semangat yang tinggi .sebagaimana diketahui bahwa proses belajar dalam rangka memberdayakan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan sikap menuju sikap yang peduli hingga dapat merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan termasuk wawasan tentang pengetahuan, kecakapan keterampilan sehingga wawasan semakin terbuka dan memberikan keterampilan dasar.

- c. Tahap meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan hingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan yang inovatif guna mengarahkan suatu kemandirian.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi anggota masyarakat ialah keterlibatan mereka dalam tahap pembangunan, meliputi kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dalam masyarakat local, partisipasi serta masyarakat untuk pembangunan merupakan perwujudan dari ketersediaan dan kemampuan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengimplementasian program yang terlaksana.

Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) yang aktif dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan dimana hal tersebut dilaksanakan oleh masyarakat di pedesaan. pemberdayaan masyarakat ialah usaha memanfaatkan serta mengelola sumberdaya masyarakat secara efektif dan efisien, baik dari.

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data rencana dan teknologi);
- b. Untuk aspek proses (pelaksanaan, memonitoring dan mengawasi);
- c. Dari aspek output (pencapaian tujuan, efektifitas, dan efisiensi).

Efektifitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target (yang direncanakan), juga rasio tersebut lebih besar dari yang lain itu berarti

efektif, begitupun sebaliknya jika rasio lebih kecil dari satu maka berarti tidak efektif. penyusunan perencanaan program pembangunan yang terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pelaksanaannya secara efektif dan efisien berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

Partisipasi dari masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang kemudian akan melaksanakan program tersebut. keterlibatan masyarakat ini bisa menjadikan mereka bertanggung jawab dalam proses pembangunan. melalui pendekatan partisipatif diharapkan adanya kreativitas masyarakat yang bisa digali. dalam artian pendekatan partisipatif diharapkan pengembangan kreativitas masyarakat yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam komunitasnya sendiri. terlibatnya masyarakat dalam beberapa aspek pembangunan maka akan menjadikan perencanaan teralihkan kepada masyarakat.

Mengingat urgennya partisipasi dalam pembangunan, maka mutlak bahwa setiap hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar harus melibatkan warga. dalam proses pembangunan ekonomi desa, warga masyarakat hendaknya tidak sekedar diposisikan sebagai objek, tapi harus menjadi subjek untuk memastikan perkembangan masyarakat, dengan demikian, jika warga masyarakat melakukan penolakan terhadap investasi, dengan demikian pemerintah juga tidak bisa memaksakan kehendaknya. partisipasi pada hakikatnya adalah bentuk

peningkatan tawar-menawar harga, hingga daya tawarnya bisa seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilih kapital.

Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan control atas kebijakan yang diambil pemerintah, jadi sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah serta sumber daya modal dari investor luar. partisipasi masyarakat ini bisa dikatakan sebagai kekuatan agar investor dari luar tidak meminggirkan ekonomi masyarakat lokal. berkaitan dengan hal ini perlu adanya regulasi regulasi dari pemerintah yang memberikan keberpihakan dan perlindungan pada masyarakat lokal. yang dimaksud dalam konteks ini adalah kearifan lokal, tradisi-tradisi lokal, maupun potensi-potensi lokal yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial pembangunan.

Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian internal dan eksternal. partisipasi cara internal diartikan adanya rasa memiliki pada kelompok tertentu. oleh karena itu kelompok atau komunitas terfragmentasi dalam identitas mereka, sementara partisipasi untuk arti eksternal berkaitan dengan individu yang melibatkan diri dengan kelompok luar, dari penjelasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa partisipasi mencakup manifestasi tanggung jawab sosial dari individu dalam komunitasnya sendiri maupun komunitas luar (hubungan dengan pemerintah maupun dengan komunitas masyarakat lainnya).

Pada partisipasi ini masyarakat semestinya dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah dimana masyarakat bersama dengan perencana ataupun pemegang kebijakan otoritas tersebut mengidentifikasi persoalan dalam sebuah diskusi kelompok, brainstorming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan.
2. Proses perencanaan dimana masyarakat dilibatkan identifikasi,
3. Pelaksanaan proyek pembangunan,
4. Evaluasi adalah keterlibatan masyarakat dalam rangka memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dilakukan, apakah pembangunan tersebut memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti proses dari evaluasi ini.
5. Mitigasi merupakan sejumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam mengukur serta mengurangi dampak negatif dari pembangunan dan
6. Monitoring, proses yang dilakukan bisa berkelanjutan, dalam tahap ini memungkinkan adanya penyesuaian penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah terlaksana.

Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah yang besar berarti dia telah berpartisipasi secara aktif dan menyukseskan jalannya pembangunan. hal tersebut menafsirkan partisipasi dalam bentuk non materi, pada umumnya

dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. dengan demikian, menjadi hal yang wajar ketika pada hakikatnya proses pembangunan yang dilakukan cenderung menguntungkan masyarakat lapisan atas, sementara kepentingan masyarakat lapisan bawah cenderung diabaikan.

C. Fungsi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berlandaskan pada permen atau peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengenai pembagian urusan pemerintah dengan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi serta pemerintah daerah Kabupaten dan Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. pemerintahan daerah yaitu penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dari prinsip otonomi seluas luasnya untuk sistem serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintah yang diluar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik dari luar negeri, pertahanan, sistem keamanan, yustisi,moneter, dan fiskal nasional serta agama.

Fungsi fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. jika pemerintahan berikutnya melaksanakan fungsi mereka secara tepat, otomatis semua tugas pokok bisa terealisasi secara baik seperti halnya dengan pelayanan yang bisa menghasilkan keadilan, pemberdayaan menghasilkan kemandirian

masyarakat, dan pembangunan yang bisa menciptakan kemakmuran. proses memberdayakan masyarakat umumnya dibentuk kemudian dibangun kesejahteraan serta kemandirian masyarakat dalam memahami prospek ekonomi didasari dengan melihat bagaimana pemerintah atau elit dengan serius memiliki keinginan membangun SDA yang berkualitas. maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program program pemberdayaan sangat dibutuhkan.

Pengembangan kapasitas (capacity building) ini telah menjadi bagian sangat penting dalam pembahasan Lembaga internasional united nations yang memberi rujukan capacity building berdimensikan pada:

1. Mandat dan struktur legal
2. Struktur kelembagaan
3. Pendekatan manajerial
4. Kemampuan organisasi dan teknnis
5. Kemampuan fiscal local
6. Aktivitas program

Dalam teori capacity building menurut model Grindle 1997 dan konsep Adaptive Governance menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptive dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif

Suatu pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang telah di kelola pemerintah agar tetap diketahui masyarakat meskipun di era global yang semakin pesat.

2. Penguatan organisasi adaptif

Sebuah proses untuk melakukan sebuah Gerakan pemerintah, perubahan multilevel pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan.



3. Pembaharuan institusional pemerintah adaptif

Melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara independen komprehensif dan sistematis terhadap banyak hal.

Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sebelumnya, maka pemerintah mempunyai instrumen atau alat guna merealisasikan cita-cita pembangunan yang disebut dengan aparatur pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah adalah alat bagi pemerintah dalam melaksanakan segala tugas pemerintah agar mencapai kesejahteraan masyarakat. Keempat pemerintah bisa dilihat secara jelas aparatur pemerintahan untuk pelaksanaan administrasi pembangunan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip dalam organisasi, yang terdiri atas visi dan misi, kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi lain seperti fungsi pendukung yang tegas, efisien dan efektif, rentang pengendalian dan tata kerja yang jelas. Hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan arahan serta pedoman yang jelas di daerah dalam rangka memberikan penataan organisasi yang efisien, efektif, serta masuk akal sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

Hal mendasar dalam menyusun perangkat daerah dalam bentuk organisasi yaitu dengan terciptanya suatu urusan pemerintah yang bisa menjadi wewenang daerah dan terdiri atas urusan yang wajib dan urusan pilihan, akan

tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa untuk menangani urusan pemerintah diharuskan terbentuk dalam organisasi tersendiri.

D. Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut

Pembangunan nasional bisa berjalan secara optimal dan bisa bersaing di pasar global, ketika ketiga aspek berjalan dengan seimbang dan didukung oleh kebijakan dari pemerintah yang setuju akan pembangunan nasional. Kebijakan dari pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berarti meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan, dimana peningkatan ini terjadi karena meningkatnya produksi yang kemudian membuka kesempatan kerja untuk menciptakan peluang dalam merealisasikan kesejahteraan sosial. Proses pemberdayaan masyarakat adalah program berkesinambungan, pemberdayaan juga bermakna untuk mengembangkan keadaan masyarakat terutama dalam aspek perekonomian. Dalam memberdayakan kalangan masyarakat pemerintah tentunya penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan petani rumput laut merupakan program yang diprioritaskan oleh kementerian kelautan dan perikanan dan juga merupakan mandat untuk memanfaatkan sumber daya laut serta perikanan yang bertanggung jawab, seperti yang tertera pada pasal 57 UU No. 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang telah diubah melalui UU No. 45 Tahun 2009.

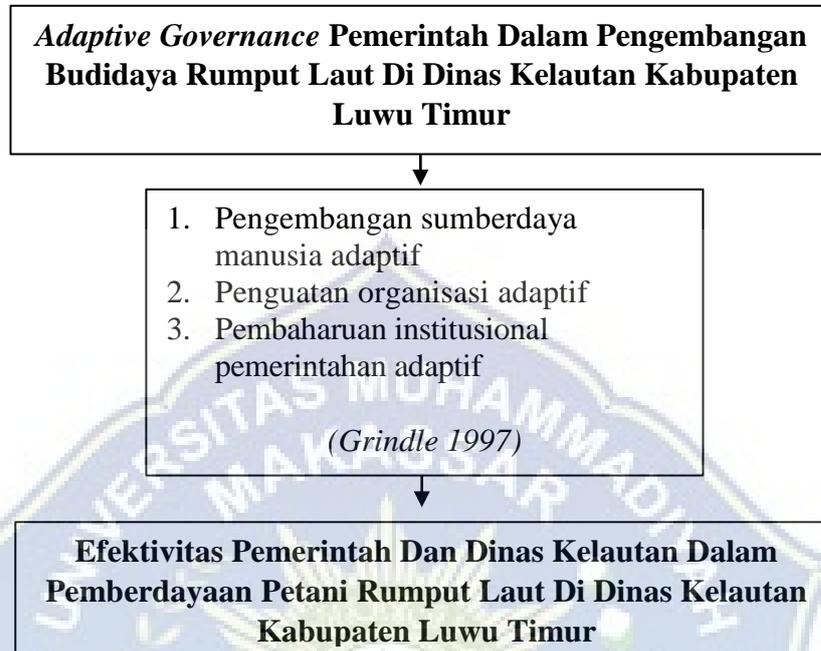
Proses untuk memastikan terealisasinya visi dari kementerian kelautan dan perikanan adalah Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015". Sekitar 70% Wilayah Indonesia terdiri atas laut, dengan pantainya yang

kaya akan berbagai jenis sumber hayati, serta lingkungan yang yang berpotensi untuk mengalami perkembangan. keadaan tersebut termasuk faktor yang bisa mendukung pembangunan berhasil yang serasi dan seimbang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. rumput laut ialah jenis komoditas hasil lautan yang memiliki potensi pengembangan. potensi tersebut cukup besar dan tersebar luas di perairan nusantara.

E. Kerangka Pikir



pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Collaborative* yang dimainkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu



Timur Kecamatan Burau dalam meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut. pemberdayaan pada hakikatnya mengarah pada kata *Empowerment* yang merupakan upaya mengaplikasikan kemampuan dan kelebihan yang telah ada pada masyarakat. pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan kepada individu yang dapat dilakukan oleh aparaturnya pemerintah daerah.

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *Collaborative* pemerintah dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau yang dinaungi oleh dinas perikanan Kabupaten Luwu. adapun indikator

pemberdayaan petani rumput laut terdiri dari pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, pembaharuan institusional pemerintah adaptif. dimana dalam pemberdayaan petani rumput laut terdapat faktor penghambat dan faktor pendukungnya.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan oleh peneliti, kemudian akan dideskripsikan dengan menggunakan Lima indikator sebagai berikut:

1. Pengembangan sumberdaya manusia adaptif

Merupakan pendekatan dalam manajemen sumber daya alam yang menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran dalam menghadapi ketidak pastian dan perubahan lingkungan

2. Penguatan organisasi adaptif

Pendekatan dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi yang responsive dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar.

3. Pembaharuan institusional pemerintahan adaptif

Pendekatan yang mencoba menjelaskan bagaimana institusi pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengatasi tantangan yang terus berkembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan ditempuh yaitu 2 bulan mulai 16 Agustus 2023 hingga 16 Oktober 2023.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Perikanan Dan pangan Kabupaten Luwu Timur tepat di Wewang Riu, Kecamatan Malili dan alasan penelitian karena ingin mengetahui Adaptive governance pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di Dinas kelautan, Perikanan dan pangan Kabupaten luwu Timur.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. tujuan digunakannya penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan *Collaborative* pemerintah dalam memberdayakan petani rumput laut yang ada di Kabupaten Luwu Kecamatan Burau serta dilaksanakan secara objektif

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah fenomenologi. maksud dari fenomenologi itu sendiri adalah dalam penelitian ini akan digambarkan dan dijelaskan masalah masalah dalam proses pemberdayaan petani rumput laut. selain masalah yang ditemukan oleh peneliti sendiri tentunya masalah yang dialami oleh informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa yang diketahui dan dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses pemerintah dalam upaya memberdayakan petani rumput laut. data primer ini digunakan dalam mengenalkan keadaan berupa kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota dengan melakukan pengamatan langsung pada setiap bagian wilayah kota.

2. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang didapat melalui pembelajaran mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa buku, dokumen dokumen, aturan operasional, dan data yang lainnya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di daerah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara yaitu menentukan pilihan dari sebagian masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan jumlah informan dalam penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Inisial	Jabatan
1	Drs.Alimuddin Nasir,M.Si	AN	Kepala Dinas
2	Muh. Syahri,S.Pi,M.Si	MS	Kabid.Perikanan Budidaya
3	Rahmawati,STP	R	Fungsional Analisis Aquakultur
4	Nurlina	N	Petani Rumput Laut

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan tindakan pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk mengetahui mengenai pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yang mengolah rumput laut di daerah Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi objek dari penelitian di Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi

Mengambil sebagian gambar berupa foto mengenai pengelolaan rumput laut oleh masyarakat dengan daerah yang memanfaatkan rumput laut.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam mengelola data yang diperoleh, dikerjakan serta digunakan atau dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data yaitu data yang ditemukan di lapangan memiliki jumlah yang banyak, oleh karena itu pada tahap ini seorang peneliti diwajibkan membuat catatan dengan teliti dan terperinci. pada tahap ini semakin lama peneliti melakukan penelitian di lapangan maka peneliti akan mendapatkan data yang akan bertambah banyak dan menjadi rumit. dikarenakan hal tersebut orang yang melakukan penelitian perlu melakukan teknik analisis data dengan cara mereduksi data. mereduksi data artinya membuat inti sari dengan menentukan beberapa hal yang bersifat pokok, serta berfokus pada hal yang dianggap penting, kemudian menemukan tema beserta polanya kemudian menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak perlu.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yang ditemukan dapat dikerjakan melalui penjelasan singkat, skema atau bagan, dan kategori yang memiliki hubungan terkait dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah selanjutnya untuk tahap analisis data kualitatif adalah menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi. pada tahap awal kesimpulan yang akan ditemukan akan bersifat sementara dimana kesimpulan akan berubah jika pada tahap selanjutnya peneliti tidak mendapatkan bukti yang jelas sebagai pendukung untuk pengumpulan data berikutnya. namun jika kesimpulan dari data dalam tahap pertama memiliki bukti yang jelas dan tidak berubah ubah ketika peneliti melakukan penelitian kembali di lapangan, maka inti sari yang kemudian akan diuraikan dapat berupa inti sari yang sudah pasti.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. triangulasi diartikan sebuah tindakan dengan melakukan pengecekan data dengan beberapa sumber-sumber dan berbagai cara, dan berbagai waktu. lebih lanjut Sugiyono kemudian memisahkan triangulasi dalam 3 jenis, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dikerjakan melalui pengecekan data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data dari lapangan melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, kemudian membandingkan hasil penelitian melalui wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dikerjakan melalui pengecekan data dalam sumber yang sama namun teknik yang berbeda. pada tahap ini data dari lapangan dengan wawancara, kemudian data tersebut di cek dengan pengamatan dan dokumen. apabila dengan teknik dalam menguji data kredibilitas tersebut, menghasilkan data berbeda, maka selanjutnya peneliti akan mendiskusikan lagi hasil penelitian yang dianggap bersangkutan dalam rangka untuk lebih memperjelas data mana saja yang sudah pasti dan bisa saja semua hasil penelitian atau data benar adanya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda beda.

3. Triangulasi Waktu

Terkait dengan triangulasi waktu, kadangkala waktu juga dapat berpengaruh terhadap data atau kondisi yang dapat dipercaya. data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara pada waktu pagi dalam

keadaan narasumber masih segar, otomatis peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid sehingga lebih kredibel. oleh sebab itu dalam tahap untuk menguji kredibilitas data, peneliti dapat melakukannya melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, pengamatan atau teknik yang lain dengan waktu dan situasi yang berbeda. Jika kemudian hasil uji memperoleh data-data yang tidak sama, maka selanjutnya peneliti harus melakukan secara berulang hingga diperoleh kepastian datanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

Sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan pengumpulan data, disediakan deskripsi temuan-temuan penelitian dan pembahasan data-data yang berkaitan dengan topik kajian. Peneliti terlebih dahulu akan memberikan pengenalan umum secara singkat tentang Kabupaten Luwu Timur sebelum menguraikan temuan penelitian dan kesimpulan dari pembahasan.

1. Profil Umum Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023, berjumlah 305.521 jiwa.

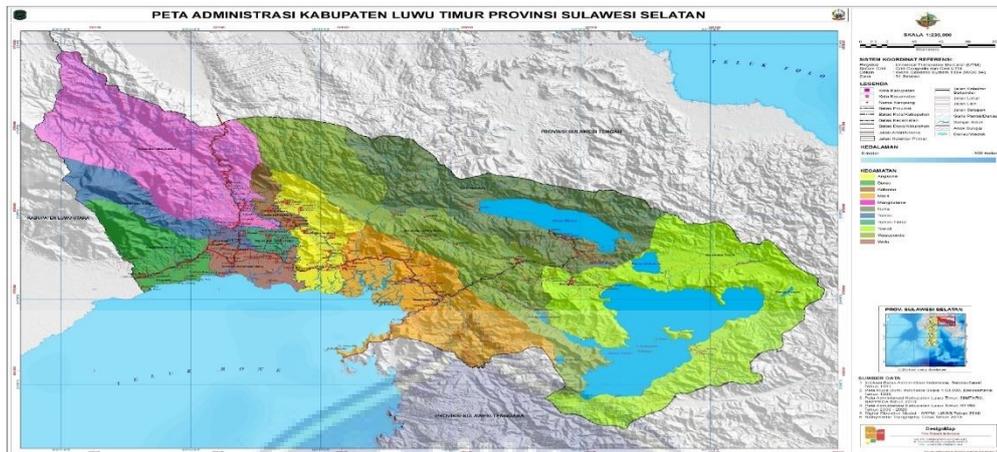
a. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.



Tabel 2.2 Luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

No	Kecamatan	Luas Wilayah Kabupaten luwu Timur Menurut Kecamatan			
		Luas (Km ²)		Persentase (%)	
1.	Burau	256,23	256,23	3,69	3,69
2.	Wotu	130,52	130,52	1,88	1,88
3.	Tomoni	230,09	230,09	3,31	3,31
4.	Tomoni Timur	43,91	43,91	0,63	0,63
5.	Angkona	147,24	147,24	2,12	2,12
6.	Malili	921,20	921,20	13,26	13,26
7.	Tuwoti	1 820,48	1 820,48	26,21	26,21
8.	Nuha	808,27	808,27	11,64	11,64
9.	Wasuponda	1 244,00	1 244,00	17,91	17,91
10.	Mangkutana	1 300,96	1 300,96	18,73	18,73
11.	Kalaena	41,98	41,98	0,60	0,60
12.	Luwu Timur	6 944,88	6 944,88	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

b. Keadaan Penduduk Kabupaten Luwu Timur

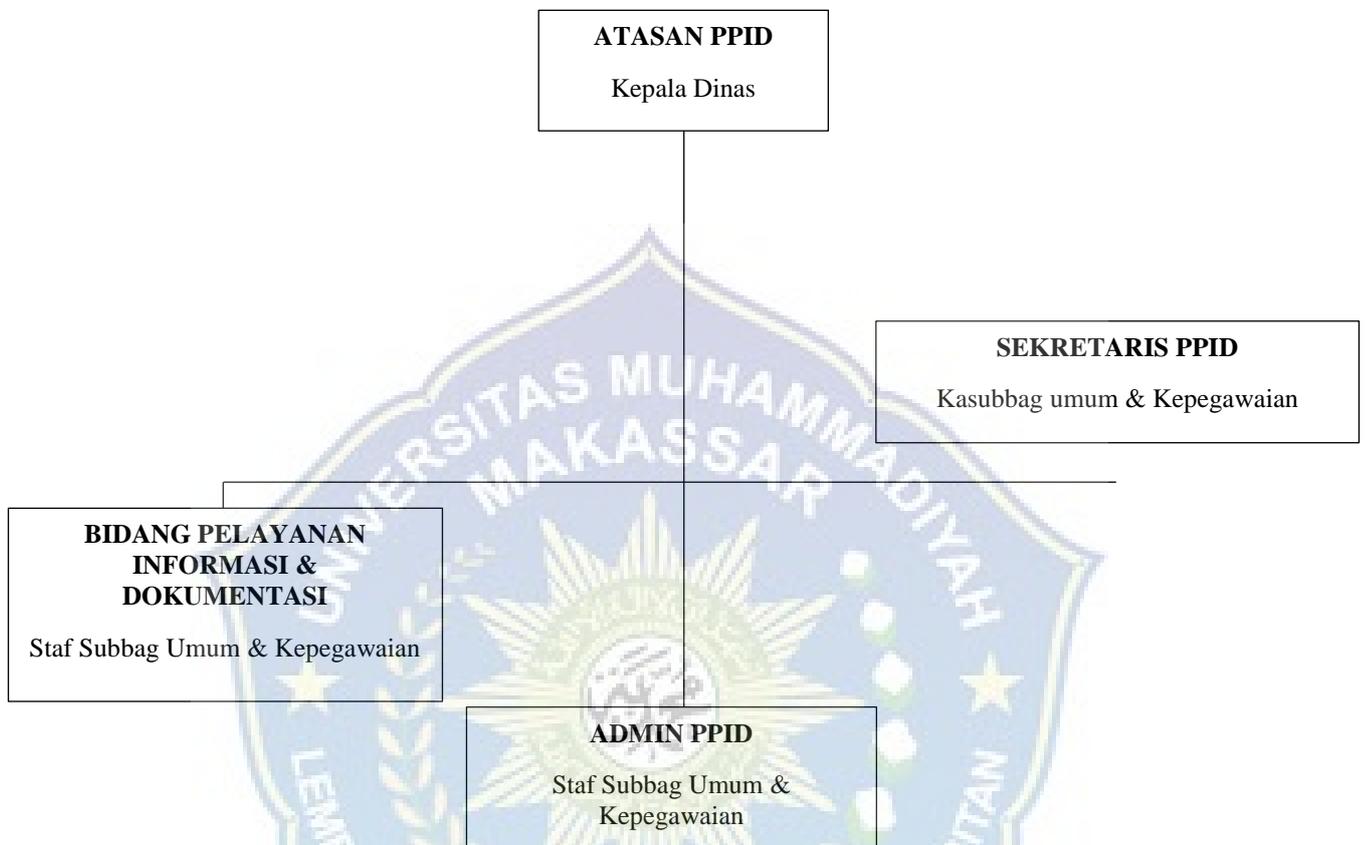
Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 tercatat kurang lebih sebanyak 305.521 jiwa Dengan laju pertumbuhan 1,67%.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mangkutana	11.363	11.067	22.430
2.	Nuha	13.232	11.256	24.488
3.	Towuti	24.855	22.138	46.993
4.	Malili	23.506	21.968	45.474
5.	Angkona	13.148	12.602	25.750
6.	Wotu	17.222	17.244	34.466
7.	Burau	17.986	17.545	35.531
8.	Tomoni	13.954	13.553	27.507
9.	Tomoni Timur	7.085	6.811	13.896
10.	Kalaena	6.137	6.134	12.271
11.	Wasuponda	11.788	10.468	22.256
	jumlah	160.276	150.786	311.062

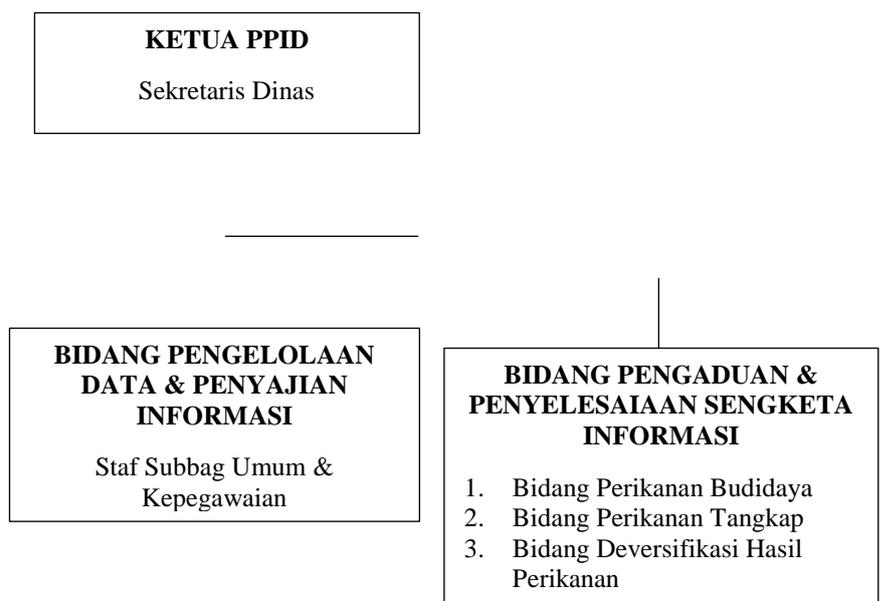
Sumber: Dinas Perikanan kabupaten Luwu Tahun 2023.

c. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan Luwu Timur



Tabel 4.4 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.



Tabel 4.5 Nama Dan Jabatan Di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Alimuddin Nasir, M.Si	Kepala Dinas
2.	Andi Yuniati, S.Pi, M.Si	Sekretaris
3.	Satya Yulianty Karini, S.Kel	Kabid. Perikanan Tangkap
4.	Muh. Syahri, S.Pi, M.Si	Kabid. Perikanan Budidaya
5.	H. Muh. Gazali, S.Pi	Kabid. Diversifikasi Hasil Perikanan
6.	Mahmuddin Mahading, S.Pi	Kasubag. Perencanaan Dan Keuangan
7.	Ilaikal Masir, S.St.Pi	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
8.	Rahmawati, STP	Fungsional Analisis Aquakultur
9.	Rosmeri, S.Pi	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
10.	Tri Wiyanto Achadi, S.Pi	Fungsional Pengelola Produk Perikanan Tangkap
11.	A. Muh. Muzakkir, S.Kel	Fungsional Pembinaan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
12.	Baharuddin, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
13.	Masfira Sain, S.Pi	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan
14.	Hariani Kanda, S.Pi	Staf
15.	Masniap, SP	Staf

16.	Silviana Fenny, S.Pi	Staf
17.	Masdar, S.AN	Staf
18.	Handayani, S.AN	Staf
19.	Suriaman, SE	Staf
20.	Nurhayati Senong, A.md	Staf
21.	Solihin, S.Pi	Staf
22.	Nurhidayah, SE	Staf
23.	Rudi Partono	Staf
24.	Daniel Matana	Staf
25.	Ratna Ratiah	Staf
26.	Yasmin Matana	Staf

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

- d. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- e. Visi Dan Misi Dinas Perikanan Dan kelautan Luwu Timur

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merumuskan Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu:

1) Visi

Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya.

2) Misi

- a) Mengembangkan perekonomian Daerah yang berdaya saing dan jaringan luas.
- b) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan Publik yang lebih baik.

f. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien, nyaman dan aman. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu diupayakan untuk dipenuhi. Namun demikian, peningkatan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, menjadikan perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6 Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan Kabupaten
luwu Timur Tahun 2022.**

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah Dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Ac Split 1 PK	15	Unit	5	3	-	53,33
Brankas	2	Unit	-	-	1	0,00
CCTV	2	Unit	-	-	1	0,00
Computer Dekstop	20	Unit	6	2	5	40,00
Computer Laptop	23	Unit	10	2	7	52,17
Dispenser	2	Unit	-	1	-	50,00
Drone (Pesawat Lain2)	1	Unit	1	-	-	100,00
Exhaust Fan	2	Unit	-	-	-	0
Filling besi/metal	6	Unit	-	-	4	0
Gorden	16	Unit	-	-	8	0,00
GPS	3	Unit	2	-	1	66,67
Kamera saku	7	Unit	3	-	4	42,86
Kamera DSLR	2	Unit	-	2	-	100,00
Handy cam	1	Unit	-	1	-	100,00
Karpet	3	Unit	1	-	-	33,33
Kendaraan Roda 2	60	Unit	29	6	18	58,33
Kendaraan Roda 4	4	Unit	1	1	-	50,00
Keyboard	1	Unit	1	-	-	100,00

Kipas Angin	1	Unit	-	1	-	100,00
Kursi tamu	1	Unit	-	-	-	0,00
Rak Arsip	6	Unit	-	-	-	0,00
Etalase	10	Unit	-	6	-	60,00
Lemari Kaca	5	Unit	-	3	-	60,00
Lemari Besi	5	Unit	-	-	2	0,00
Lemari Es	2	Unit	1	-	-	50,00
Lemari Kayu	6	Unit	2	1	-	50,00
Meja rapat	1	Unit	1	-	-	100,00
Mesin absensi(Finger Print)	2	Unit	1	-	-	50,00
Mesin FAX	2	Unit	1	-	1	50,00
Mesin Pengisap Debu	1	Unit	-	-	-	0,00
Mesin pompa air	2	Unit	1	-	-	50,00
Mesin tik manual	2	Unit	-	-	2	0,00
Mesin tik listrik	1	Unit	1	-	-	100,00
Printer	26	Unit	7	2	10	34,62
Proyektor dan layar	2	Unit	1	-	1	50,00
Scanner	2	Unit	1	-	-	50,00
Sofa	2	Unit	2	-	-	100,00
Sound system	2	Unit	1	-	-	50,00
Stabilizer/stavolt	10	Unit	3	-	3	30,00
Telepon	1	Unit	-	-	1	0,00

Televisi	6	Unit	4	-	-	66,67
UPS	10	Unit	4	-	2	40,00
Wireleses	2	Unit	1	-	-	50,00
Rata Rata Ketersediaan Sarana Dan Prasarana						47,33

Sumber: Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Tabel 4.7 Jenis Dan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021

No	Jenis komoditasi	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mas	397	421	435	437	439
2.	Nila	241	264	273	272	274
3.	Mujair	233	256	265	258	261
4.	Gurami	14,70	16	19	21	24
5.	Lele	171	221	259	257	281
6.	Betok	1,40	2	2	2	1
7.	Bawal Tawar	15,30	15	13	11	12
8.	Bandeng	10,412	10,563	11,710	12,050	14,370
9.	Baronang	3,60	5	5	5	3
10.	Udang Windu	565	529	557	561	562
11.	Udang Vaname	1,145	1,165	1,252	1,293	1,720
12.	Udang Api-Api	1,187	1,257	1,283	1,322	1,202
13.	Kepiting	135	135	139	141	80
14.	Rumput Laut	144,314	148,008	150,377	150,892	155,800

	Graaciliaria. Sp					
15.	Rumput Laut	150,092	146,889	148,691	147,820	140,467
	Euchemia					
	Cottoni					
	Jumlah	308,927	309,746	315,278	315,342	315,496

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

B. Hasil Penelitian Pada Kantor Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur

Tugas Pokok Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan secara umum berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 yakni membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016 – 2023 sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan dan sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016– 2023.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan periode 2016 – 2023 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya maupun dari kalangan pemerhati Perikanan dan Pangan dalam mensukseskan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Dalam hal ini penelitian memfokuskan *Adaptive Governance* Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur dengan tiga (3) indikator yaitu pengembangan sumberdaya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif dan pembaharuan institusional pemerintahan adaptife.

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif

Pengembangan sumberdaya manusia adaptif dalam konteks pengembangan budidaya rumput laut melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang terlibat dalam industri rumput laut untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam praktik budidaya.

pentingnya pendidikan dan pelatihan kontinu untuk para petani rumput laut. Ini bisa mencakup pelatihan tentang teknik budidaya terbaru, manajemen risiko, dan penanganan masalah lingkungan yang terkait dengan budidaya rumput laut.

mendorong penggunaan teknologi terbaru dalam budidaya rumput laut. Ini termasuk penggunaan sensor, monitor lingkungan, dan sistem pengelolaan data untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Sangat penting di lakukan karna kenapa kondisi budidaya itu sewaktu waktu akan berubah setiap saat akan berubah dan kondisi cuaca iklim suhu pertama hujan biasa tiba tiba turun hujan jadi di sini di perlukan penyesuaiaan dan secara sistematis petani ini harus di ajar bagai mana caranya kondisi budidaya ini kemudian yang ke dua faktor harga tiba tiba harga turun atau anjlok misalnya sampai 13.000 Rp kita arahkan petani rumput laut tidak dulu menurunkan bibit rumput laut di situ juga perlunya adptife ” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif ada dua indikator yaitu curah hujan dan harga yang naik turun.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Perubahan iklim dapat memiliki dampak signifikan pada budidaya rumput laut ada beberapa dampak utama yaitu: yang pertama peningkatan suhu permukaan laut yang ke dua perubahan pola curah hujan yang tidak menentu dan yang ke tiga peningkatan intensitas badai, pemerintah juga sudah bekerja sama dengan

petani rumput laut supaya bisa mengembangkan varietas rumput laut yang lebih tahan dengan suhu yang tidak menentu seperti sekarang ini. Pemerintah juga mengfokuskan pelatihan dan Pendidikan guna Masyarakat petani rumput lau lebih paham mengenai persoalan cara pengelolaan rumput laut di masa sekarang yang cuaca tidak menentu” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif pemerintah Kabupaten Luwu Timur sudah memberikan arahan kepada Masyarakat petani rumput laut, teknologi pemantauan iklim dan lingkungan dapat membantu para petani untuk memahami perubahan yang sedang terjadi dan mengambil Tindakan pencegahan yang di perlukan.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Kolaborasi Pemerintah dengan Masyarakat petani rumput laut pemerintah menyiapkan bibit kemudian kami tindak lanjuti dengan pemprof terus kita berikan ke Masyarakat petani rumput laut dan pemprof memberikan setiap tahun bibit rumput laut” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif pemerintah Kabupaten Luwu Timur sudah menetapkan pertahun untuk pemberian bibit ke Masyarakat petani rumput laut.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia

Adaptif adalah sebagai berikut:

“Para petani atau pelaku budidaya rumput laut di sini masih perlu mengembangkan keterampilan khusus untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi yang saat ini, petani rumput laut di sini masih terbelakang persoalan Teknik budidaya yang terkini menyebabkan keterbelakangan untuk memahami dan menerapkan Teknik budidaya yang efisien” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Masyarakat petani rumput laut masih perlu mempelajari keterampilan khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan di harapan Dengan mengembangkan keterampilan keterampilan ini, para petani atau pelaku budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur akan menjadi lebih siap dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan teknologi dalam industri mereka.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa Langkah langkah program pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia yang pertama itu analisis kebutuhan mengidentifikasi area yang perlu penanganan khusus seperti budidaya baru, manajemen resiko, pemasaran dan teknologi” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Dengan desain program yang tepat, petani rumput laut di Kabupaten Luwu Timur dapat meningkatkan

adaptabilitas dan inovasi mereka dalam menghadapi perubahan, serta memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan terbaru dapat diaplikasikan dalam praktik budidaya mereka.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dengan SDM yang adaptif, para pekerja dapat menerapkan inovasi dalam metode budidaya rumput laut. Mereka dapat mengidentifikasi peluang baru, mengintegrasikan teknologi terkini, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk meningkatkan hasil produksi” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Dengan SDM yang adaptif, para pekerja dapat menerapkan inovasi dalam metode budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“perubahan iklim yang dialami oleh para pelaku budidaya rumput laut, serta strategi dan inovasi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. SDM yang adaptif, dengan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan menerapkan perubahan dalam praktik budidaya, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan produktivitas dalam menghadapi perubahan iklim” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu perubahan iklim yang dialami oleh para pelaku budidaya rumput laut, serta strategi dan inovasi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Petani perlu memiliki pemahaman mendalam tentang praktik-praktik keberlanjutan dalam budidaya rumput laut, termasuk manajemen limbah, penggunaan sumber daya yang efisien, dan praktik ramah lingkungan” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Petani perlu memiliki pemahaman mendalam tentang praktik-praktik keberlanjutan dalam budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Meningat peran teknologi dalam budidaya rumput laut, program pelatihan harus fokus pada pengenalan dan penerapan teknologi yang relevan. Ini dapat mencakup pelatihan penggunaan sensor lingkungan, sistem irigasi otomatis, atau perangkat lunak manajemen pertanian” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Mengingat peran teknologi dalam budidaya rumput laut, program pelatihan harus fokus pada pengenalan dan penerapan teknologi yang relevan.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam merancang dan menyelenggarakan program pelatihan bersama. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, manajemen risiko, dan pengenalan teknologi terkini yang mendukung kemampuan adaptasi petani” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam merancang dan menyelenggarakan program pelatihan Bersama.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Pengembangan sumber daya manusia adaptif dapat meningkatkan produktivitas dalam budidaya rumput laut. Pelatihan dan pendidikan yang tepat dapat membantu petani meningkatkan keterampilan teknis, mengoptimalkan praktik budidaya, dan menggunakan metode inovatif” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Pengembangan sumber daya manusia adaptif dapat meningkatkan produktivitas dalam budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia yang adaptif dapat mengadopsi praktik budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan nutrisi, termasuk pemantauan dan manajemen yang lebih baik terhadap ketersediaan nutrisi di perairan” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu mengadopsi praktik budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan nutrisi.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Pemahaman yang baik terhadap tren pasar global terkait produk budidaya rumput laut” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Pemahaman yang baik terhadap tren pasar global.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Berikan pelatihan tentang teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya rumput laut, seperti sensor suhu air, sistem pemantauan otomatis, atau aplikasi digital untuk manajemen data” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Berikan pelatihan tentang teknologi terkini yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Menyediakan program subsidi atau dana hibah untuk pelatihan petani dalam praktik budidaya yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, manajemen risiko, dan penggunaan teknologi baru” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Menyediakan program subsidi atau dana hibah.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, sektor budidaya rumput laut dapat menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada adaptabilitas dan pengetahuan lokal dapat menjadi kunci kesuksesan dalam memajukan industri ini” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu sektor budidaya rumput laut dapat menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang terus berubah.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia, individu yang terlibat dalam budidaya rumput laut dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan lebih mampu mengelola risiko yang terkait dengan faktor-faktor tersebut” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Melalui pendidikan, pelatihan, dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memperkuat keterampilan-keterampilan ini agar para petani atau pelaku budidaya rumput laut dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan teknologi serta tetap berkelanjutan dalam usahanya” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memperkuat keterampilan-keterampilan ini agar para petani atau pelaku budidaya rumput laut dapat menjadi lebih adaptif.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Melalui desain program pelatihan yang holistik dan terukur, petani rumput laut dapat diberdayakan untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan teknologi di sektor budidaya rumput laut” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu Melalui desain program pelatihan yang holistik dan terukur.

Dengan hal ini Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah sebagai berikut:

“Kolaborasi lintas sektor ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dan holistik, memanfaatkan keahlian masing-masing pihak untuk mengatasi kompleksitas tantangan di industri budidaya rumput laut. Dengan demikian, hal ini dapat memperkuat pengembangan sumber daya manusia adaptif dan meningkatkan keberlanjutan industri secara keseluruhan” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif yaitu memanfaatkan keahlian masing-masing pihak untuk mengatasi kompleksitas tantangan di industri budidaya rumput laut.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif Keseluruhan, pengembangan sumber daya manusia adaptif memiliki dampak yang

signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan industri budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur. Para petani yang dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat dapat berperan penting dalam menjaga industri ini tetap berkembang dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

2. Penguatan Organisasi Adaptif

Penguatan Organisasi Adaptif adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan organisasi agar dapat lebih efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis. Organisasi adaptif adalah organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, merespons, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara proaktif. Dalam konteks pengembangan budidaya rumput laut.

Identifikasi perubahan dan tren dalam industri budidaya rumput laut, seperti faktor iklim, teknologi baru, regulasi, dan permintaan pasar. Dengan memahami lingkungan yang terus berubah, organisasi dapat mengantisipasi tantangan dan peluang baru. Dengan menerapkan teori pengembangan penguatan organisasi adaptif dalam pengembangan budidaya rumput laut, organisasi dapat menjadi lebih tanggap terhadap perubahan, lebih efisien, dan dapat mengoptimalkan produksi mereka dalam menghadapi lingkungan yang dinamis.

Penguatan organisasi Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multilevel pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka

agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Namun demikian, dalam pengembangan tata kelola yang baik (good governance) dapat diadaptasi untuk menyusun organisasi pemerintahan. Misalnya, diperlukan cara pengorganisasian yang lebih fleksibel, dan dibentuk dengan baik yang memberikan check and balances, selalu dibuka kemungkinan mekanisme umpan balik yang efektif dan sebagainya.

Dengan hal ini Penguatan Organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan Organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“ada yang namanya kelompok tani setiap kelompok itu ada 10 orang Pengembangan budidaya rumput laut dapat membantu organisasi mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Dengan memiliki portofolio yang beragam, organisasi akan lebih mampu bertahan jika salah satu sektor mengalami tekanan dari perubahan lingkungan atau pasar” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif pemerintah Kabupaten Luwu Timur sudah menetapkan organisasi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan.

Dengan hal ini Penguatan Organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan Organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Sudah jelas kami lakukan koordinasi dengan Pengembangan budidaya rumput laut mendorong organisasi untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi teknologi ini dapat diterapkan tidak hanya dalam proses budidaya, tetapi juga

dalam pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk. Organisasi yang berinvestasi dalam inovasi cenderung lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif yaitu untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru, organisasi yang andil di dalam pengembangan budidaya rumput laut cenderung lebih siap menghadapi perubahan tuntutan konsumen.

Dengan hal ini Penguatan Organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan Organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dilakukannya kerja sama antara kelompok satu dengan yang lain karna Ketika tidak ada Kerjasama antara pihak organisasi dengan pihak petani rumput laut itu akan lama pembibitannya di lakukannya Kerjasama bisa mempercepat produksi” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif yaitu untuk mempercepat pembibitan rumput laut di Kabupaten luwu Timur.

Dengan hal ini Penguatan Organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan Organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Identifikasi hambatan potensi yang di hadapi oleh organisasi seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, peraturan baru, atau gangguan pasokan itu Sebagian dari hambatan yang di lewati pada saat pengembangan budidaya rumput laut” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif yaitu ada beberapa hambatan yang di lalui pemerintah pihak organisasi dengan Masyarakat petani rumput laut.

Dengan hal ini Penguatan Organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan Organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Kalau di petani itu kariawan rata rata Kerjasama ada juga yang tidak kerja sama tapi itu tidak lama karna semisal dia memberikan uang serratus juta untuk dua hektar itu hanya berlangsung tiga tahunan yang bagus itu adalah Ketika sama sama seperti contohnya petani ini membagikan lahannya satu hektar dan dia mengolah dua hektar lalu di bantulah untuk mengelola” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif yaitu petani rumput laut berkerjasama dengan pihak Masyarakat dengan memberikan lahannya Sebagian untuk di kelola.

Dengan hal ini penguatan organisasi adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Organisasi dapat mengadopsi inovasi teknologi dalam budidaya rumput laut, seperti sistem sensor untuk memantau kondisi lingkungan, teknik pemupukan yang lebih efisien, atau sistem irigasi yang otomatis. Ini membantu organisasi menjadi lebih efisien, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif yaitu Organisasi dapat mengadopsi inovasi teknologi

dalam budidaya rumput laut, seperti sistem sensor untuk memantau kondisi lingkungan.

Dengan hal ini penguatan organisasi adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan program pelatihan rutin untuk petani dan pekerja budidaya guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait teknik budidaya terkini, manajemen risiko, dan praktik keberlanjutan” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif yaitu Menyelenggarakan program pelatihan rutin untuk petani dan pekerja.

Dengan hal ini penguatan organisasi adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Kolaborasi memungkinkan para anggota dari berbagai bagian organisasi untuk memahami konteks budidaya rumput laut secara holistik. Dengan berbagi informasi dan pengalaman, setiap bagian dapat memahami bagaimana tindakan mereka berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan organisasi” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Kolaborasi memungkinkan para anggota dari berbagai bagian organisasi untuk memahami konteks budidaya rumput laut secara holistic.

Dengan hal ini penguatan organisasi adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Membangun budaya komunikasi terbuka yang memungkinkan para anggota organisasi untuk menyampaikan masalah dan ide-ide secara jujur. Inisiatif ini dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan yang mungkin tidak terdeteksi secara langsung” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Membangun budaya komunikasi terbuka yang memungkinkan para anggota organisasi untuk menyampaikan masalah dan ide-ide secara jujur.

Dengan hal ini penguatan organisasi adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Sesuaikan proses pengambilan keputusan dengan melibatkan karyawan dalam pengembangan strategi budidaya rumput laut. Fasilitasi diskusi kelompok dan pertemuan terbuka untuk mendengarkan pandangan dan ide mereka” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Sesuaikan proses pengambilan keputusan dengan melibatkan karyawan dalam pengembangan strategi budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Melalui pengembangan budidaya rumput laut yang holistik dan adaptif, organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi perubahan lingkungan dan pasar” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif organisasi dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi perubahan lingkungan dan pasar.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“organisasi budidaya rumput laut dapat memperkuat daya tanggap mereka terhadap perubahan dan menjadi lebih adaptif terhadap dinamika kompleks dalam lingkungan dan pasar mereka” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif memperkuat daya tanggap mereka terhadap perubahan.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Melalui kolaborasi antar bagian, organisasi budidaya rumput laut dapat menciptakan lingkungan yang adaptif, responsif terhadap perubahan, dan mampu memanfaatkan keahlian dan sumber daya internal secara optimal. Hal ini membantu organisasi untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika yang terus berubah dalam industri budidaya rumput laut” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Melalui kolaborasi antar bagian.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Investasikan dalam program pendidikan dan pelatihan untuk karyawan. Pastikan bahwa karyawan memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi terbaru, praktik berkelanjutan, dan manajemen risiko” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Investasikan dalam program pendidikan dan pelatihan.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Bentuk tim proyek atau kelompok kerja yang berfokus pada inisiatif pengembangan budidaya rumput laut. Ini dapat memfasilitasi kolaborasi lintas departemen dan meningkatkan kreativitas dalam menanggapi tantangan dan peluang” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Bentuk tim proyek atau kelompok kerja yang berfokus pada inisiatif pengembangan budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dengan mengintegrasikan pendekatan ini dalam pengembangan budidaya rumput laut, organisasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Penting untuk terus memonitor perkembangan terkini, mendengarkan umpan balik dari pasar dan pemangku kepentingan, serta memperbarui strategi

bisnis secara berkala untuk tetap relevan dan berkelanjutan” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Dengan mengintegrasikan pendekatan ini dalam pengembangan budidaya rumput laut, organisasi dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan pasar.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dengan menerapkan strategi-strategi ini, organisasi budidaya rumput laut dapat meningkatkan daya tanggap dan adaptabilitasnya terhadap perubahan lingkungan dan pasar, serta memperkuat posisinya dalam industri tersebut” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif organisasi budidaya rumput laut dapat meningkatkan daya tanggap dan adaptabilitasnya terhadap perubahan lingkungan dan pasar.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dengan kolaborasi antar bagian, organisasi budidaya rumput laut dapat menciptakan lingkungan yang adaptif, tanggap terhadap perubahan, dan mampu mengoptimalkan kinerja operasionalnya. Ini memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar yang terus berubah” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif tanggap terhadap perubahan, dan mampu mengoptimalkan kinerja operasionalnya.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Dengan pendekatan ini, organisasi budidaya rumput laut dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menjadi lebih adaptif dan tanggap terhadap perubahan. Ini melibatkan kombinasi analisis proaktif, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta kolaborasi efektif dengan pemangku kepentingan” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif organisasi budidaya rumput laut dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menjadi lebih adaptif dan tanggap terhadap perubahan. Ini melibatkan kombinasi analisis proaktif.

Dengan hal ini Penguatan organisasi Adaptif berikut wawancara penulis dengan N Petani Rumput Laut terkait Penguatan organisasi Adaptif adalah sebagai berikut:

“Melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan budidaya rumput laut bukan hanya menciptakan organisasi yang lebih adaptif, tetapi juga meningkatkan dukungan masyarakat, mengurangi konflik potensial, dan memperkuat dampak positif pada lingkungan sekitar” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Penguatan Organisasi Adaptif Melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan

dalam proses pengembangan budidaya rumput laut bukan hanya menciptakan organisasi yang lebih adaptif.

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait Penguatan Organisasi Adaptif pengembangan budidaya rumput laut menjadi sumber daya ekonomi yang adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan pasar di Kabupaten Luwu Timur. Ini membantu organisasi dan masyarakat menjadi lebih siap dan tanggap terhadap tantangan dan peluang yang terus berubah.

3. Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife

Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah pendekatan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat. Dalam konteks pengembangan budidaya rumput laut. Identifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pengembangan budidaya rumput laut, termasuk aspek lingkungan, teknologi, pasar, dan masyarakat. Ini akan membantu dalam merancang regulasi yang relevan dan adaptif.

Libatkan berbagai pihak, seperti petani rumput laut, ilmuwan, organisasi lingkungan, dan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang relevan dan solusi yang dapat diterima bersama.

Dengan menerapkan Teori Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif dalam pengembangan budidaya rumput laut, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri yang

berkelanjutan sambil tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife adalah sebagai berikut:

“Ini bekerja sama dengan badan penelitian balai penelitian seperti balai budidaya rumput laut di sana tempatnya pengembangan budidaya rumput laut kalau awal awalnya itu dari tahun 2007 sampai 2015, pemerintah juga membentuk tim khusus atau unit tugas yang fokus pada pengembangan industri budidaya rumput laut, tim ini terdiri dari berbagai ahli yang mencakup berbagai bidang yang pertama kelautan yang ke dua perikanan yang ke tiga lingkungan yang ke empat ekonomi dan yang ke lima regulasi” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu ada tim khusus yang bergerak dalam industry budidaya rumput laut dan tim yang di gerakkan ada beberapa yang pertama kelautan, perikanan, lingkungan, ekonomi, dan regulasi.

“institusi pemerintahan mengenai persoalan budidaya rumput laut yang adaptif yaitu membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur termasuk izin usaha, perlindungan lingkungan, dan kualisi produk yang di hasilkan pemerintah juga mengembangkan infrastruktur seperti Pelabuhan, fasilitas pemrosesan, jalan akses, dan penyediaan listrik, adapula pengelolaan anggaran dan sumber daya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industry budidaya rumput itu sendiri” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu pemerintah sudah membuat

kebijakan dan regulasi untuk memajukan pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Mengambil Langkah cepat yaitu pengumpulan informasi dalam hal inovasi, dan perubahan dalam industry budidaya rumput laut, teknologi yang di gunakan untuk mengakomodasi perubahan yah itu teknologi platform online, survei cepat, dan grop diskusi yang bisa memperoleh informasi yang secara real time” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu pengumpulan informasi cepat, proses keputusan yang cepat, dan komunikasi efektif.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife berikut wawancara penulis dengan AN Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife adalah sebagai berikut:

“Pembentukan Forum Komunikasi antar kecamatan, lurah, dan desa dan melibatkan kelompok kerja atau petani rumput laut atau di diskusikan terbuka di desa atau di kecamatan forum ini juga menjadi platform untuk berbagai informasi dan solusi terkait industry budidaya rumput laut, ada juga partisipasi dalam perencanaan strategi pemberdayaan peteni rumput laut merumuskan rencana aksi untuk industri budiaya rumput laut. Dengan melibatkan Masyarakat petani rumput laut keputusan yang di ambil pemerintah akan lebih mewakili kebutuhan dan aspirasi semua kalangan Masyarakat yang menjadi petani rumput laut” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu pemerintah dapat menjalin Kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani rumput laut peneliti, dan organisasi swadaya Masyarakat, untuk memperkuat adaptabilitas industry budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur.

“langkah langkanya yaitu pertama penyusunan kebijakan strategis dalam mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam pengembangan budidaya rumput laut di kabupaten Luwu Timur menetapkan indikator kinerja yang dapat di ukur untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yang ke dua menetapkan konsultan dengan pemangku kepentingan seperti melibatkan petani rumput laut, peneliti yang ke tiga menetapkan regulasi yang responsif seperti regulasi yang mendukung pertumbuhan industry yang terakhir pemasaran dan promosi produk seperti petani mengembangkan merek dan strategi pemasaran yang efektif” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Dengan mengambil langkah-langkah konkret seperti yang di jelaskan informan di atas, pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat menciptakan kebijakan progresif yang mendorong pertumbuhan budidaya rumput laut yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah sebagai berikut:

“Melakukan pemetaan kebutuhan industri budidaya rumput laut dengan berkomunikasi secara langsung dengan para pelaku industri dan pemangku kepentingan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tantangan, peluang, dan harapan mereka terhadap pemerintah” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Melakukan pemetaan kebutuhan industri budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah sebagai berikut:

“Menyediakan insentif ekonomi untuk mendorong investasi dalam industri budidaya rumput laut. Insentif ini dapat mencakup pemotongan pajak, kredit pajak, atau bantuan keuangan lainnya yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Menyediakan insentif ekonomi untuk mendorong investasi.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah sebagai berikut:

“Implementasikan sistem pemantauan yang efektif untuk melacak perkembangan terbaru dalam industri budidaya rumput laut. Pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan data secara real-time atau berkala” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Implementasikan sistem pemantauan yang efektif untuk melacak perkembangan terbaru dalam industri budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah sebagai berikut:

“Bentuk kelompok konsultatif yang melibatkan perwakilan dari petani rumput laut, peneliti, dan organisasi swadaya masyarakat. Kelompok ini dapat menjadi forum untuk berbagi informasi, mendiskusikan isu-isu kritis, dan merumuskan solusi bersama” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Bentuk kelompok konsultatif yang melibatkan perwakilan dari petani rumput laut.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif berikut wawancara penulis dengan R Fungsional akultural Dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah sebagai berikut:

“Mengembangkan kebijakan yang terpadu dan holistik untuk budidaya rumput laut. Kebijakan ini harus memperhitungkan aspek-aspek seperti praktik budidaya berkelanjutan, manajemen risiko, penelitian dan inovasi, serta kesejahteraan Masyarakat” (Wawancara 22 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Mengembangkan kebijakan yang terpadu dan holistik untuk budidaya rumput laut.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif adalah sebagai berikut:

“Pemerintah dapat mengadopsi strategi perencanaan tata ruang yang mendukung budidaya rumput laut, termasuk penetapan zona khusus dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Pemerintah dapat mengadopsi strategi perencanaan tata ruang yang mendukung.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan forum dialog rutin, pertemuan stakeholder, atau konsultasi publik untuk menciptakan kesempatan bagi pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, ide, dan masalah yang dihadapi” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Menyelenggarakan forum dialog rutin.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif adalah sebagai berikut:

“Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, akademisi, dan masyarakat, dapat membantu pemerintah memahami dinamika industri secara lebih holistik” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Keterlibatan pemangku kepentingan.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif adalah sebagai berikut:

“Mengundang perwakilan dari petani rumput laut, peneliti, dan organisasi swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam komite atau kelompok kerja yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Ini dapat memastikan representasi yang adil dan suara mereka didengar” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptife yaitu Mengundang perwakilan dari petani rumput laut.

Dengan hal ini Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif Adaptif berikut wawancara penulis dengan MS Perikanan Kabupaten

Luwu Timur terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif

Adaptif adalah sebagai berikut:

“pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang progresif dan mendukung perkembangan budidaya rumput laut yang adaptif dan berkelanjutan” (Wawancara 18 Agustus 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif yaitu pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang progresif.

Beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terkait Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif dengan mengadopsi strategi institusional yang adaptif, pemerintah dapat menjadi fasilitator utama dalam perkembangan industri budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif, responsif, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan industri tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait *Adaptive Governance* Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur menggunakan tiga indikator teori (Grindle 1997) Yaitu:

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan suatu rancangan dari sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan

organisasi sesuai dengan keinginan (Mathis dan Jackson 2006). Senada dengan itu pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintahan adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia yang telah di kelola pemerintah agar tetap diketahui pegawai dan masyarakat meskipun di era global yang semakin pesat.

Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus.

Pengembangan sumber daya manusia adaptif adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi mempersiapkan dan mengembangkan karyawan mereka agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan bisnis. Ini melibatkan sejumlah strategi dan praktik yang mendukung perkembangan individu dan tim dalam konteks perubahan.

pengembangan sumber daya manusia adaptif adalah mengevaluasi kebutuhan. Organisasi harus memahami perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis dan mengidentifikasi kompetensi apa yang diperlukan oleh karyawan untuk menghadapinya.

Pengembangan adaptif mempromosikan budaya pembelajaran kontinu. Organisasi harus menyediakan peluang untuk pembelajaran dan pengembangan karyawan secara teratur. Ini bisa berupa pelatihan, kursus, seminar, dan akses ke sumber daya pembelajaran online.

Karyawan perlu diberdayakan dengan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Ini melibatkan pengembangan kemampuan fleksibilitas, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap peran dan tanggung jawab baru.

Program mentoring dan coaching dapat membantu karyawan memperoleh panduan dan dukungan pribadi dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi adaptif mereka.

Penilaian kinerja harus mencakup evaluasi kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Ini dapat mencakup pengukuran berbasis kompetensi dan pencapaian tujuan terkait adaptabilitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pengembangan Sumberdaya Manusia Adaptif ada beberapa dampak utama yaitu: yang pertama peningkatan suhu permukaan laut yang ke dua perubahan pola curah hujan yang tidak menentu dan yang ke tiga peningkatan intensitas badai, pemerintah juga sudah bekerja sama dengan petani rumput laut supaya bisa mengembangkan varietas rumput laut yang lebih tahan dengan suhu yang tidak menentu seperti sekarang ini.

2. Penguatan Organisasi Adaptif

Penguatan organisasi Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multilevel pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka

agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan.

Penguatan Organisasi Adaptif adalah pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan menghadapi perubahan yang berkelanjutan dan kompleks dalam lingkungan bisnis. Ini melibatkan serangkaian strategi dan tindakan yang dirancang untuk mengubah organisasi agar lebih responsif terhadap perubahan. Langkah pertama dalam penguatan organisasi adaptif adalah kesadaran akan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal. Organisasi harus memahami tren pasar, perubahan regulasi, dan dinamika internal yang dapat memengaruhi kinerja mereka.

Penguatan organisasi adaptif membutuhkan kepemimpinan yang visioner yang dapat memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk berubah. Pemimpin harus mendorong budaya berinovasi dan kolaboratif. Organisasi harus mengadopsi prinsip pembelajaran kontinu. Ini melibatkan proses mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman, membagikannya, dan menerapkannya untuk meningkatkan operasi.

Budaya organisasi yang mendukung adaptabilitas adalah kunci. Organisasi harus menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru diterima dan di mana karyawan merasa nyaman untuk berbicara tentang perubahan. Keterlibatan karyawan adalah kunci dalam penguatan organisasi adaptif. Organisasi harus mendorong kolaborasi, komunikasi yang terbuka, dan

keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan.

Penilaian kinerja harus mencakup evaluasi kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini termasuk mengukur keterampilan fleksibilitas, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi terhadap peran baru. Organisasi harus memiliki struktur yang memungkinkan perubahan dan adaptasi yang cepat. Ini bisa mencakup tim lintas-fungsional, model manajemen mandiri, atau model organisasi berbasis proyek. Penggunaan teknologi yang tepat dapat mempermudah pengumpulan dan pertukaran informasi, serta memfasilitasi kerja tim dan kolaborasi. Penting untuk mengukur hasil dari upaya penguatan organisasi adaptif. Organisasi harus mengidentifikasi metrik yang sesuai untuk mengukur keberhasilan dalam beradaptasi dan merespon perubahan.

Organisasi harus secara teratur mengevaluasi dan merevisi strategi penguatan adaptif mereka. Ini melibatkan pembelajaran dari pengalaman dan terus menerus meningkatkan kemampuan beradaptasi. Penguatan Organisasi Adaptif adalah suatu pendekatan strategis yang membantu organisasi untuk tetap relevan, bersaing, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga. Hal ini memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan terus berkembang di lingkungan bisnis yang berubah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Penguatan Organisasi Adaptif bahwa mendorong organisasi untuk

mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi teknologi ini dapat diterapkan tidak hanya dalam proses budidaya, tetapi juga dalam pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk. Identifikasi hambatan potensi yang di hadapi oleh organisasi seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, peraturan baru, atau gangguan pasokan itu Sebagian dari hambatan yang di lewati padasaat pengembangan budidaya rumput laut

3. Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif

Pembaharuan institusional adaptif adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara indepeden sikomprehensif dan sistematis terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pemerintah adaptif, serta sistem bernegara, berorganisasi dan imparialitas instutional.

Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah konsep yang mengacu pada upaya pemerintah untuk memperbarui dan mengubah struktur dan proses pemerintahan agar lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk menjadikan pemerintah lebih responsif, inovatif, dan efisien dalam menghadapi tantangan dan peluang yang berkembang.

pembaharuan institusional pemerintahan adaptif adalah mengidentifikasi perubahan lingkungan yang relevan. Ini dapat mencakup perubahan dalam kebijakan, teknologi, demografi, dan kondisi ekonomi. Kepemimpinan pemerintah yang visioner sangat penting dalam

menginisiasi dan memandu pembaharuan institusional. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat tentang bagaimana pemerintah dapat lebih adaptif.

Pemerintah perlu mengembangkan rencana strategis yang mencakup tujuan, langkah-langkah, dan metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan pembaharuan adaptif. Pembaharuan institusional seringkali memerlukan kerja sama dan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik dan koordinasi tindakan. Pemerintah harus mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik. Ini dapat mencakup penggunaan teknologi, eksperimen kebijakan, dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah perlu menciptakan budaya yang mendukung adaptabilitas dan inovasi. Ini melibatkan penghormatan terhadap ide-ide baru, berpikir kreatif, dan toleransi terhadap risiko yang dikendalikan.

Teknologi dan data dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan informasi yang lebih baik. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan dan mengumpulkan data yang relevan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik yang bermanfaat adalah komponen penting dari pembaharuan adaptif. Ini dapat mencakup konsultasi publik, partisipasi warga, dan kemitraan. Pemerintah harus memiliki metrik dan mekanisme evaluasi yang memungkinkan mereka untuk mengukur keberhasilan pembaharuan adaptif dan membuat perbaikan berkelanjutan.

Pemerintah harus memperhatikan pembelajaran dari pengalaman mereka dan bersedia untuk mengubah pendekatan mereka jika diperlukan. Ini melibatkan proses perbaikan berkelanjutan. Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif adalah penting dalam memungkinkan pemerintah untuk tetap relevan dan efisien dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam dunia yang terus berubah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dengan lebih baik dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan dari segi Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Luwu Timur termasuk izin usaha, perlindungan lingkungan, dan kualisi produk yang di hasilkan pemerintah juga mengembangkan infrastruktur seperti Pelabuhan, fasilitas pemrosesan, jalan akses, dan penyediaan listrik.

Tabel 4.6 Wawancara Dan Hasil Wawancara 2023.

Sumber: Nvivo 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan tiga indikator sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengembangan sumber daya manusia Adaptif petani rumput laut di sini masih terbelakang persoalan Teknik budidaya yang terkini menyebabkan keterbelakangan untuk memahami dan menerapkan Teknik budidaya yang efisien.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penguatan Organisasi Adaptif hambatan potensi yang di hadapi oleh organisasi seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, peraturan baru, atau gangguan pasokan itu Sebagian dari hambatan yang di lewati padasaat pengembangan budidaya rumput laut.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembaharuan Institusional Pemerintahan Adaptif kebijakan strategis dalam mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam pengembangan budidaya rumput laut di kabupaten Luwu Timur menetapkan indikator kinerja yang dapat di ukur untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

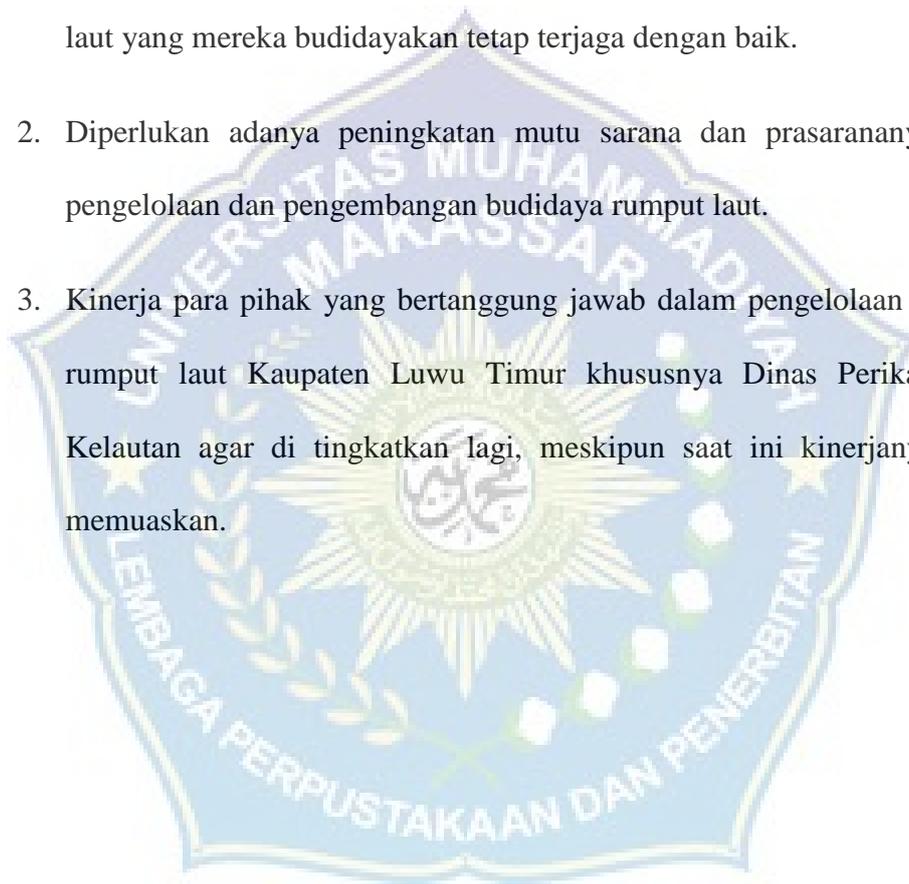
B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “*Adaptive Governance* Pemerintah Dalam Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Dinas Kelautan Kabupaten Luwu Timur” ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar

dapat melaksanakan pengembangan budidaya rumput laut yang lebih baik.

Adapun saran yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah memberikan pemahaman yang Kontinu kepada para petani rumput laut mengenai bagaimana cara membudidayakan rumput laut dengan baik sehingga kualitas dari rumput laut yang mereka budidayakan tetap terjaga dengan baik.
2. Diperlukan adanya peningkatan mutu sarana dan prasarananya dalam pengelolaan dan pengembangan budidaya rumput laut.
3. Kinerja para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan budidaya rumput laut Kabupaten Luwu Timur khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan agar di tingkatkan lagi, meskipun saat ini kinerjanya cukup memuaskan.



DAFTAR PUSTAKA

- Athirah, A., Asaf, R., & Tarunamulia, T. (2021). Value Chain Dan Pola Pengembangan Kelembagaan Komoditi Rumput Laut (*Kappaphycus Alvarezii*) Di Desa Kolorai Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 16(1), 51-62.
- Grindle, M. (1997). *Getting Good Governance: Capacity Building In The Public Sector Of Developing Countries*. Boston: Harvard Institute For International Development
- Irawan, Denny. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Issn 1303- 341x Volume 5, Nomor 3*.
- Kusnadi, 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu Strategi Mengatasi Kemiskinan Nelayan*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Irawan, Denny. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Issn 1303- 341x Volume 5, Nomor 3*.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep, Teori, Dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusuma, N. P. D., Turnip, G., & Nomleni, A. (2021). Pengelolaan Budidaya Rumput Laut Oleh Masyarakat Pesisir Saat Pandemi Covid-19 Di Desa Tablolong. In *Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia* (Vol. 1, Pp. 89-99).
- Khaldun, R. I. (2019). Pengembangan Komoditas Rumput Laut Melalui Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Di Sulawesi Tengah. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 21-27.
- Mahardhika, M. A. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Marisha, D. Y. (2020). *Model Collaborative Governance Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Duta Di Kabupaten Probolinggo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Wijaya, Andy Fefta Dan Oscar Radyan Danar. 2014. *Manajemen Publik (Teori Dan Praktik)*. Malang: Universitas Brawijaya Press(Ub Press).
- Nilasari, Dias. 2017. *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. ([Http://Jurnal.Ipb.20ac.Id/Index.Php/Jupe/Article/View/2161](http://Jurnal.Ipb.20ac.Id/Index.Php/Jupe/Article/View/2161)) Di Akses 20 November 2017 Pukul 21:00

- Yusuf, Iyas. 2014. *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. ([Http://Www. Iyasyusuf.Asia/2014/05/Peran-Dan-Fungsipemerintahan-Dalam-Html](http://www.Iyasyusuf.Asia/2014/05/Peran-Dan-Fungsipemerintahan-Dalam-Html)) Di Akses 19 November 2017 Pukul 14:00
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama : Bandung
- Hidayat, A., & Safitri, P. (2019). Pengembangan Komoditas Rumput Laut Nusa Tenggara Barat Dengan Model Hexagon Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 45-56.
- Imam, Muhammad. 2016. *Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur*. ([Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Strategi+Pemerintah+Dalam+Pemberdayaan+Petani+Rumput+Laut&Btn](https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Strategi+Pemerintah+Dalam+Pemberdayaan+Petani+Rumput+Laut&Btn)) Di Akses 19 November 2017 Pukul 13:20



L

A

M

P

I

R

A



N



**Wawancara Dengan Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Luwu Timur 18
Agustus 2023.**

Wawancara Dengan Fasional Akultural Dinas Perikanan Kabupaten Luwu



Timur 22 Agustus 2023.



Wawancara Dengan Petani Rumput Laut Kabupaten Luwu Timur 24

Agustus 2023.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 23603/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu Timur
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2260/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: REVALINA
Nomor Pokok	: 105641100619
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ADAPTIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DINAS KELAUTAN KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Agustus s/d 16 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth.
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal*

BAB I Revalina 105641100619

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

2

tugasmakalah96.blogspot.com

Internet Source

2%

3

kaltim.bps.go.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes

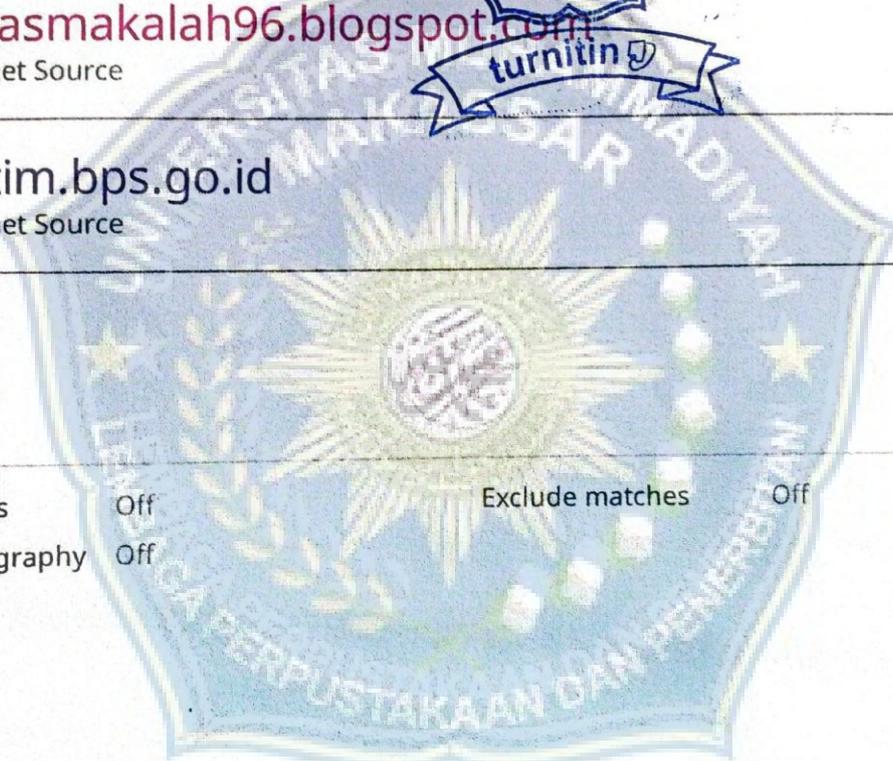
Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



BAB II Revalina 105641100619

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

4%

2

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

3

akademik.unsoed.ac.id

Internet Source

<1%

4

Submitted to Doral Academy High School

Student Paper

<1%

5

tugasakhiramik.blogspot.com

Internet Source

<1%

6

www.fisip.unsoed.ac.id

Internet Source

<1%

7

menulisbersamaaswir.blogspot.com

Internet Source

<1%

8

ashariyanto.wordpress.com

Internet Source

<1%

9

docplayer.info

Internet Source

<1%

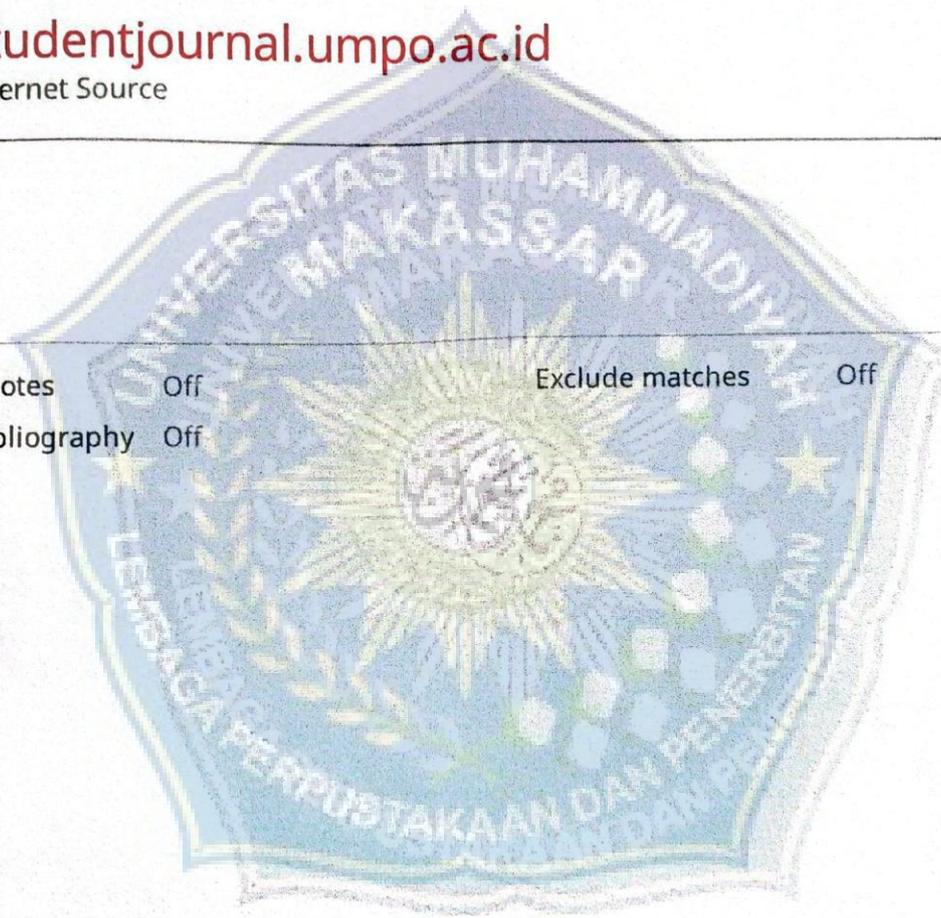


- 10 id.scribd.com
Internet Source <1 %
-
- 11 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper <1 %
-
- 12 mafiadoc.com
Internet Source <1 %
-
- 13 studentjournal.umpo.ac.id
Internet Source <1 %
-

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



AB III Revalina 105641100619

ORIGINALITY REPORT

7 %	5 %	3 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source		3 %
2	text-id.123dok.com Internet Source		2 %
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper		1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

AB IV Revalina 105641100619

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
2	luwutimurkab.bps.go.id Internet Source	1%
3	id.wikipedia.org Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	distan.luwukab.go.id Internet Source	<1%
6	dkpp.luwutimurkab.go.id Internet Source	<1%
7	sumbarprov.go.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

10 id.scribd.com
Internet Source <1%

11 www.darsonmate.blogspot.com
Internet Source <1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



AB V Revalina 105641100619

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

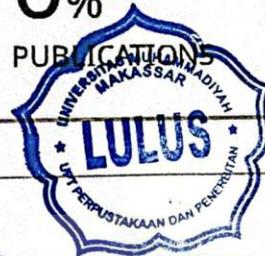
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



eprints.umg.ac.id
Internet Source

3%



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Revalina

Nim : 105641100619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





Revalina, lahir di Palopo pada tanggal 14 oktober 1999. Penulis merupakan anak ke empat dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Ilham dan Ibu Nurhaeni. Saat ini penulis beralamat di toddopuli 6 beringin 7 Kota Makassar. Penulis pertama kali memasuki TK Al-Hidayah pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis.

Melanjutkan pendidikan SD Negeri 005 Bunyu dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Bunyu dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Bunyu dan tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru. Pada tahun 2024 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul Adaptive governance pemerintah dalam pengembangan budidaya rumput laut di kabupaten Luwu Timur . Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa saja yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.